



**RENCANA AKHIR (RENJA) KECAMATAN UPAU
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN UPAU
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 3

 1.1 Latar Belakang 3

 1.2 Landasan Hukum 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2024 8

 2.1 Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Capaian Ranstra 8

 2.2 Analisa Kinerja SKPD Kec. Upau 14

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD 15

 2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 18

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 25

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 25

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja..... 26

 3.3 Program dan Kegiatan 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN UPAU 31

BAB V PENUTUP 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Upau sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Kecamatan Upau tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Upau sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong. Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Upau tahun 2025 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Upau untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di 6 desa yang ada di wilayah Kecamatan Upau, maka di tahun 2025 Kantor Kecamatan Upau memprioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Desa
2. Peningkatan kualitas pembangunan desa.
3. Peningkatan kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

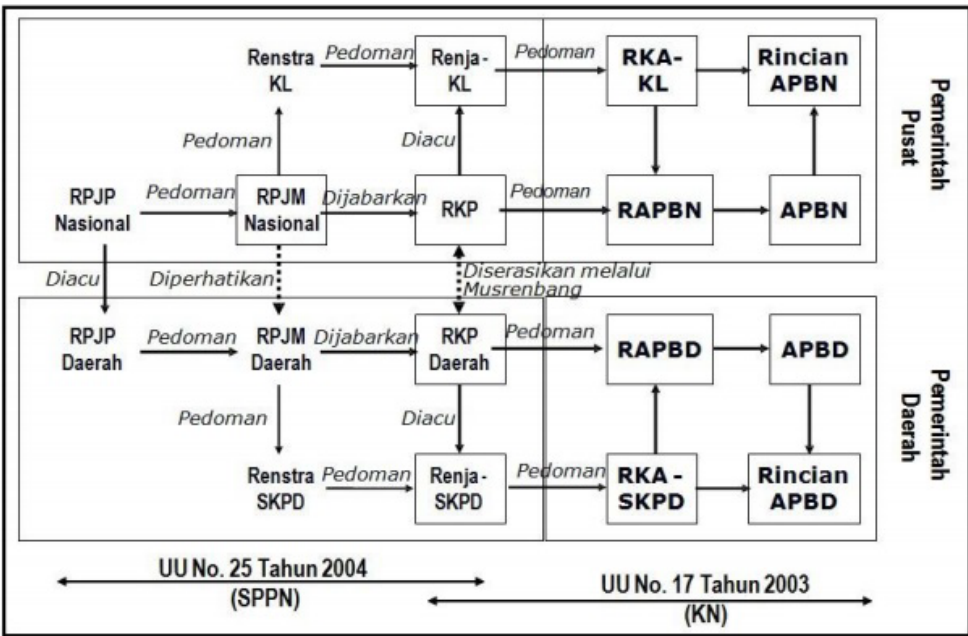
- 5. Penambahan sarana dan prasarana kantor demi memberikan fasilitas yang nyaman untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan ataupun tidaknya Renja SKPD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Upau.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Upau Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Persiapan penyusunan,
- 2. Penyusunan rancangan awal,
- 3. Penyusunan rancangan,
- 4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- 5. Perumusan rancangan akhir, dan
- 6. Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Upau Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 maka bagi daerah Kabupaten/Kota yang periode perencanaannya berakhir pada tahun 2024
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014–2034.
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh SKPD.
3. Memberikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Upau Tahun 2025 sebagai berikut :

- | | |
|-------|---------------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN UPAU TAHUN 2023
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Upau Tahun 2023
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Upau
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
2.4	Upau
	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Upau
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN UPAU
BAB V	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Upau

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Upau Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Upau Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Upau Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Upau Tahun 2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Upau Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Upau Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan SKPD tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian		
				Target	realisasi	Tingkat realisasi		Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s.d Tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian %	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	B	B	100%	B (63 Nilai)	B	100%	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran Dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-

7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen / 13 Orang/bulan	20 Dokumen/ 13 org/bl n	100%	-
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	-
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-

7.01.01.2.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	3 Doku men 3 Doku men	3 Doku men	100%	3 Dokumen	3 Doku men	100%	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	-
7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	-
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	100 %	25 Paket	25 Paket	100 %	-
7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	6 Paket	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	-
7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514 Laporan	2 Lapor an	2 Lapor an	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pebngadaan Barang Milik Daerah	100 %	12 Unit	12 Unit	100%	0	0	100%	-
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit	12 U nit	12 U nit	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	-
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Lapor an	4 Lapor an	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	-
7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Lapor an	6 Lapor an	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	34 Unit	34 Unit	34 Unit	100%	34 Unit	34 Unit	100%	-

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jmlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliha	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100 %	22 Unit	22 Unit	100 %	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	-
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	- Unit	- Unit	- Unit	%	1 Unit	1 Unit	100 %	-
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	-	-	100 %	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	80%	80%	80 %	100%	80%	80%	100%	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	-

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir/ Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata	85%			100%	100%	100 %	100%	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6 Desa	6 Desa	6 desa	100%	6 Desa	6 Desa	100%	-
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %	6 Desa	6 Desa	100%	-
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	-
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	650	650	650	100 %	650	650	100 %	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	-

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	6 Laporan	6 Lapo ran	6 lapor an	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%	-
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Lapo ran	6 Lapo ran	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	85%	1 Lap oran	1 Lap oran	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokume n	2 Doku men	2 Doku men	100%	2 Dokumen	2 Dokume n	100%	-
7.01.05.2.01 .0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	200 Oran g	200 rang	100 %	200 Orang	200 rang	100 %	-
7.01.05.2.01 .0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokume n	3 Doku men	3 Doku men	100 %	3 Dokumen	13 Dokume n	100 %	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan/ Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	-

7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	6 Desa	6 Desa	100 %	6 Desa	6 Desa	100 %	-
7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	-
7.01.06.2.0 1.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan sumber daya manusia dalam hal Pengelolaan Anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Upau adalah adanya optimis pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Upau mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Upau menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Upau, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.

- 2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Upau adalah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Upau

No	Indikator	Angka Nilai Target Standar	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatananalisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan	100 %	-	97,08%	97,08%	97,37%	97,64%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
2	Nilai AKIP		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-
3	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa		-	74,17	74,17	75,4	75,8	70	70	75	80	80	80	-
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	50	82,5	83,9	84,59	70	75	75	80	84,59	100	-
5	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan		-	72,96	73,75	73,83	73,96	80	80	80	80	85	100	
6	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		-	50	79,17	80,83	82,23	80	80	80	80	80	80	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Upau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Upau mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

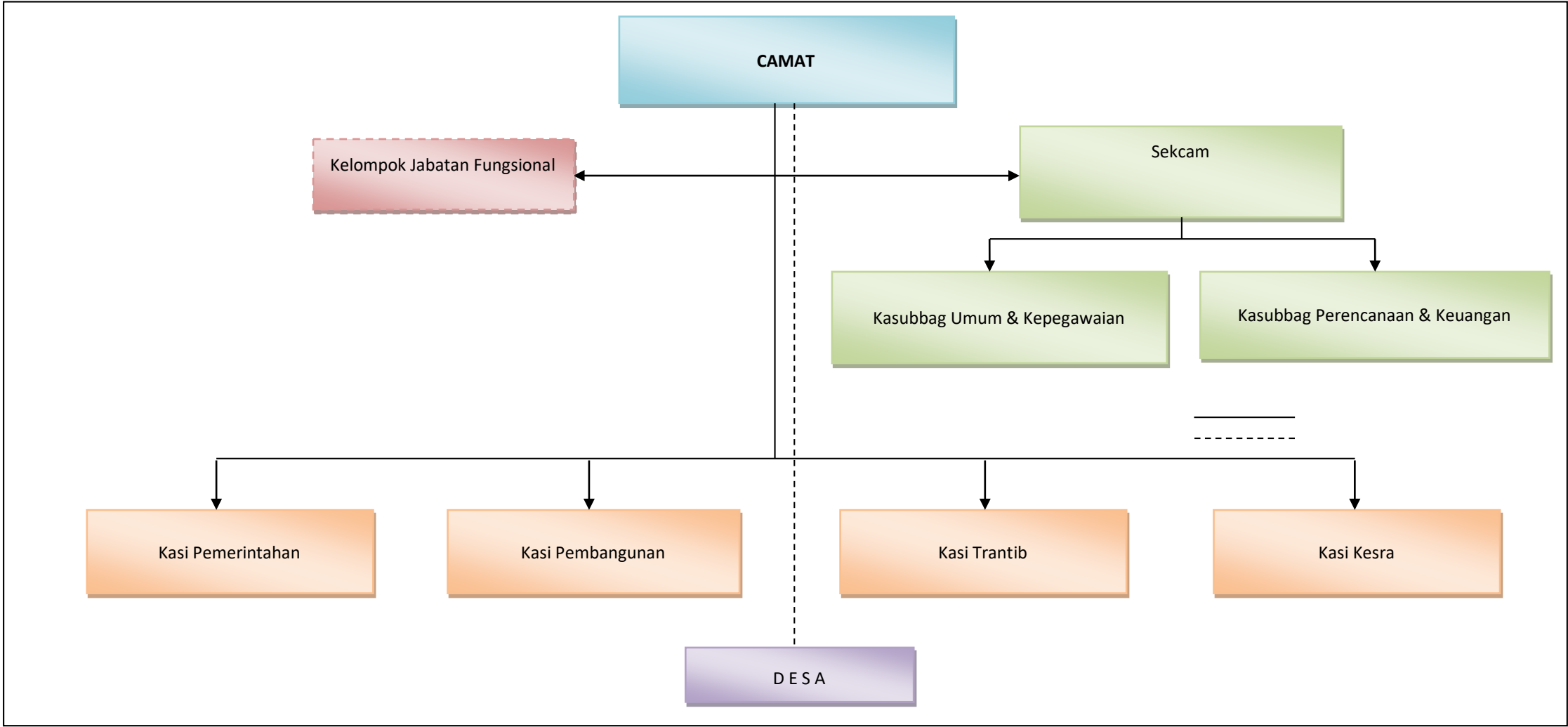
Kecamatan Upau memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Upau adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, disamping membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Upau

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**



Kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Upau dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil SKPD Kecamatan Upau untuk membantu dalam pelaksanaan tugas, sehingga pada masing-masing Kasi ada yang tidak memiliki staf.
2. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga capaian kinerja individual masih relatif rendah. Tingkat SDM aparat Kecamatan Upau khususnya staf yang masih terbelah rendah juga minimnya penguasaan komputer dan internet menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan, serta kurangnya kesadaran aparat pemerintahan di Kantor Kecamatan Upau dalam tertib administrasi.
3. Kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan yang berkompeten.
4. Masih rendahnya tanggung jawab aparatur pemerintahan desa terhadap pelaksanaan tugas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Upau juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Upau diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Upau yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Upau yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Upau adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Upau belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kesejahteraan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
2. Bidang Pemerintahan
Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.
3. Bidang Pelayanan
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Upau untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Bidang Pertanian

Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Upau. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Upau untuk dijadikan perumahan atau pertambangan

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Upau Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3/ 2.6
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kecamatan Upau Tahun 2025 Kab Tabalong.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC. UPAU	Nilai AKIP	B	2.679.967.885,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC. UPAU	Nilai AKIP	B	2.679.967.885,00	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. UPAU	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran Dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	19.580.040,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. UPAU	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	19.580.040,00	
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.500.000,00	
I.1.2	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	
I.1.3	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.080.000,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.080.000,00	
I.1.4	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	

I.1.5	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.000.040,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.000.040,00	
I.1.6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1.500.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	10.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	10.000.000,00	Penambahan Cetak Buku Statistik Sektoral Daerah, dan Uang Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC. UPAU	Terlaksananya penatausahaan	20 Dokumen	2,271,569,395.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC. UPAU	Terlaksananya penatausahaan	20 Dokumen	2,271,569,395.00	
			keuangan Perangkat Daerah					keuangan Perangkat Daerah			
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ 14 Bulan	1.898.745.767,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ 14 Bulan	1.898.745.767,00	
I.2.2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan SKPD			2 Laporan	1.950.412,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan SKPD			2 Laporan	1.950.412,00	
			Jumah laporan akhir tahunan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahunan SKPD					Jumah laporan akhir tahunan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahunan SKPD			

I.2.3	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		534.824,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		534.824,00	
				18 Laporan					18 Laporan		
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC. UPAU	Terlaksananya kegiatan administrasi	100%	313.756.986,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC. UPAU	Terlaksananya kegiatan administrasi	100%	313.756.986,00	
			Umum					Umum			
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Banguann Kantor		Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	5 Paket	7.417.700,00	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Banguann Kantor		Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	5 Paket	7.417.700,00	
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	85.319.596,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	85.319.596,00	
I.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	3 Paket	6.883.690,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	3 Paket	6.883.690,00	
I.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514 Laporan	214.136.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514 Laporan	214.136.000,00	
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah	KEC. UPAU	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	65.453.679,00	Pengadaan Barang Milik Daerah	KEC. UPAU	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	65.453.679,00	
I.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	65.453.679,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Unit	65.453.679,00	
I.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Unit	34.800.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang disediakan	4 Unit	34.800.000,00	
I.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	213.920.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	213.920.000,00	

I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC. UPAU	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	12 Unit	131.226.177,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	12 Unit	131.226.177,00	
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya	12 Unit	110.560.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	110.560.000,00	
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	12 Unit	13.520.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihararta'	12 Unit	13.520.000,00	
I.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah sarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara.	1 Unit	7.146.177,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	7.146.177,00	
II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEC. UPAU	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	43.065.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEC. UPAU	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	43.065.000,00	
II.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	43.065.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	43.065.000,00	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC. UPAU	Jumlah usulan masyarakat yang Diakomodir	85%	53,139,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC. UPAU	Jumlah usulan masyarakat yang Diakomodir	85%	53,139,000.00	
III.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC. UPAU	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6 Desa	12.163.500,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC. UPAU	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6 Desa	12.163.500,00	
III.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	12.163.500,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	12.163.500,00	
III.2	Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti	650 Keluarga	56.155.000,00	Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti	650 Keluarga	56.155.000,00	

	Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
III.2.1	Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	650 Keluarga	56.155.000,00	Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	650 Keluarga	56.155.000,00	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC.UPAU	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	85%	94.868.728,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC.UPAU	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	85%	94.868.728,00	
IV.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC.UPAU	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	94.868.728,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC.UPAU	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	94.868.728,00	
IV.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	59.001.786,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	59.001.786,00	
	Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	17.067.750,00	Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	17.067.750,00	
V.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia	200 Orang	138.191.060,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	200 Orang	138.191.060,00	

	Negara Kesatuan Republik Indonesia		Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
V.12	Pelaksanaan Tugas Prokopinca		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	3 Dokumen	11.410.000,00	Pelaksanaan Tugas Prokopinca		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instalasi Vertikal Terkait	3 Dokumen	11.410.000,00	
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC.UPAU	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	80%	1.639.372.912,00	PROGRAM PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. UPAU	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	85%	1.639.372.912,00	
VI.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC.UPAU	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	11 Laporan	1.639.372.912,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. UPAU	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	11 Laporan	1.639.372.912,00	
			tingkat kecamatan					tingkat kecamatan			
VI.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.618.142.912,00	Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.618.142.912,00	
VI.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	21.230.000,00	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	21.230.000,00	
JUMLAH PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2025 BERDASARKAN HASIL ANALISIS					4.675.194.085,00					4.675.194.085,00	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yaitu : **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, telah ditetapkan Fokus Pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Nasional (PN) tahun 2024 yang ditetapkan ada 7 (tujuh) yaitu :

- PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Posisi kecamatan dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 2025 menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2025, yaitu memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan,

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pelayanan publik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pelayanan publik yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Upau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Upau Tahun 2025.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Upau Tahun 2025.
3. Memberikan pedoman dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Dengan mengusung tema “**Penguatan Daya Saing Daerah untuk mendukung Tabalong Terdepan**” maka di tahun 2025 Kantor Kecamatan Upau memprioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Desa
2. Peningkatan kualitas pembangunan desa.
3. Peningkatan kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
5. Penambahan sarana dan prasarana kantor demi memberikan fasilitas yang nyaman untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut perlu ditempuh melalui penetapan beberapa Sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun rencana kerja, tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Upau dapat dilihat dalam tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Upau

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD (outcome)
1.	Mewujudkan Kemandirian Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Mewujudkan Kemandirian Daerah	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2
Tujuan Kecamatan Upau

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Kinerja SKPD Tahun 2025
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Nilai AKIP	BB

Tabel 3.3
Sasaran Kecamatan Upau

No	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Sasaran SKPD Tahun 2025
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Nilai AKIP	BB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Upau

No	Indikator Kinerja Utama IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja 2025
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Nilai AKIP	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rancangan program dan kegiatan Kecamatan Upau tahun 2025 dituangkan dalam renja Kecamatan Upau tahun 2025. Jumlah seluruh program di tahun 2025 sebanyak enam program dengan jumlah kegiatan sebanyak tiga belas kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.675.194.085,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Tabalong. Adapun Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Upau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
-Rumusan Rencana Program/Kegiatan Kecamatan Upau Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Lokasi	Renja Akhir Tahun 2025			Kondisi kinerja pada akhir priode renstra SKPD	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	Kecamatan Upau	100%	37.340.000,-	PAD	100%	100%	45.000.000,00
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Upau	12 Laporan	37.340.000,-	PAD	100%	12 Laporan	45.000.000,00
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP	Kecamatan Upau	B	3.762.536.048,-	PAD	80%	B	2.695.604.000
	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Upau	2 Dokumen	19.395.000,-	PAD	100%	2 Dokumen	22.500.000,00
	3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	Kecamatan Upau	20 Dokumen	2.990.176.236-	PAD	100%	20 Dokumen	1.904.000.000,00
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Upau	100%	334.005.119,-	PAD	100%	100%	316.000.000,00
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Upau	100%	255.460.750,-	PAD	100%	100%	250.000.000,00
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kecamatan Upau	46 Unit	163.498.943,-	PAD	100%	46 Unit	133.500.000,00
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Layanan Umum lainnya Tepat Waktu	Kecamatan Upau	80%	320.248.060,-	PAD	85%	85%	152.000.000,00
	7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Upau	1 Laporan	320.248.060,-	PAD	100%	1 Laporan	152.000.000,00

4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Kecamatan Upau	80%	55.257.292,-	PAD	85%	87%	79.000.000,-
	8.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Upau	12 Dokumen	55.257.292,-	PAD	100%	12 Dokumen	79.000.000,00
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase layanan umum lainnya tepatwaktu	Kecamatan Upau	85%	2.699.567.761,-	PAD	80%	85%	1.700.000.000,00
	9.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Upau	1 Laporan	2.699.567.761,-	PAD	1 Laporan	1 Laporan	1.700.000.000,00
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir	Kecamatan Upau	80%	94.245.000,-	PAD	85%	85%	72.000.000,00
	10.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Upau	13 Lembaga Kemasyarakatan	8.090.000,-	PAD	100%	13 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00
	11.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Upau	200 Keluarga	86.155.000,-	PAD	100%	200 Keluarga	58.000.000,00
	Program : 6 Kegiatan : 11					6.969.194.161,-				4.744.600.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN UPAU

4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 merencanakan enam program dan sebelas kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai Rp. **6.969.194.161,00** ,-. Program dan Kegiatan tersebut secara terinci sebagaimana

Tabel 4.1

Sasaran, Program, Sub Kegiatan Kecamatan Upau Tahun 2025.

No	Sasaran SKPD	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga

		Berkualitas
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
		7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan

		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
		7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
		7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
		7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
		7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas kemudian dirumuskan kedalam rencana Program, Rencana Kegiatan dan Rencana Sub Kegiatan, kecamatan Upau tahun 2025, adapun Rumusan Program, kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Upau pada Tahun anggaran 2025, dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut ini

Tabel 4.2								
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Upau Tahun 2025								
Kode	Urusan / Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu		Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
	KECAMATAN UPAU				6.969.194.161,00			4.197.600.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.969.194.161,00			4.197.600.000,00
7.01	KECAMATAN				6.969.194.161,00			4.197.600.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.762.536.048,00			3.766.600.000,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 Dokumen	19.395.000,00		8 Dokumen	22.700.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.125.000,00		2 Dokumen	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Dokumen	1.125.000,00		1 Dokumen	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	900.000,00		1 Dokumen	1.500.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1.125.000,00		1 Dokumen	1.700.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	690.000,00		1 Dokumen	1.700.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	1.125.000,00		1 Dokumen	1.300.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1.125.000,00		1 Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dann Diperiksa Lingkuo Perangkat Daerah		1 Laporan	12.180.000,00		1 Laporan	10.500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.990.176.236,00			2.503.700.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10/14 Orang/bulan	2.987.691.000,00		10/14 Orang/bula n	2.500.000.000,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	1.950.412,00		2 Laporan	2.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu		Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>		4 Laporan	534.824,00		4 Laporan	1.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	334.005.119,00		-	375.200.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		5 Paket	5.917.700,00		5 Paket	8.200.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		25 Paket	169.942.729,00		25 Paket	90.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>		3 Paket	6.883.690,00		3 Paket	9.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		514 Laporan	151.261.000,00		514 Laporan	268.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	255.460.750,00		-	315.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		4 Laporan	64.967.000,00		4 Laporan	36.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		6 Laporan	190.493.750,00		6 Laporan	285.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	163.498.943,00		-	153.500.000,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		12 Unit	110.560.000,00		12 Unit	122.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		12 Unit	13.520.000,00		12 Unit	21.500.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi</i>		1 Unit	39.418.943,00		1 Unit	10.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	2.699.567.761,00		-	126.000.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	2.699.567.761,00		-	93.000.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		1 Laporan	2.682.067.761,00		1 Laporan	93.000.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		3 Dokumen	17.500.000,00		3 Dokumen	33.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu		Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	94.245.000,00		-	67.000.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	8.090.000,00		-	15.000.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6 Laporan	8.090.000,00		6 Laporan	15.000.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-	86.155.000,00		-	42.000.000,00
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>		650 Keluarga	86.155.000,00		650 Keluarga	42.000.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	37.340.000,00		-	43.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	37.340.000,00		-	43.000.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		12 Laporan	37.340.000,00		12 Laporan	43.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	320.248.060,00		-	109.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	320.248.060,00		-	109.000.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		200 Orang	313.498.060,00		200 Orang	44.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		6 Dokumen	6.750.000,00		6 Dokumen	65.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN			-	55.257.292,00		-	44.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu		Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
	DESA							
7.01.06.2.0002	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		-	55.257.292,00		-	44.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12 Dokumen	20.250.000,00		12 Dokumen	22.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen	18.289.192,00		1 Dokumen	22.000.000,00
Jumlah					6.969.194.161,00			4.197.600.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dengan memperhatikan catatan-catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindak lanjut pelaksanaan sebagai berikut :

1. Catatan Penting

- Dokumem Renja Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun berdasarkan RPD 2025 - 2026, RKPD serta doumen perencanaan 5 (lima) tahunan Renstra Tahun 2025 - 2026, guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

2. Kaidah Pelaksanaan

- Dokumen Renja Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun anggaran, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Upau Tahun 2025.
- Renja Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kecamatan Upau.
- Dokumen Renja Tahun 2025 digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, perkiraan tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan R-APBD 2025;
- Dokumen Renja digunakan sebagai alat untuk merumuskan tujuan dan sasaran kegiatan, untuk merencanakan program kegiatan guna mencapai tujuan Kecamatan Upau dan untuk menentukan indikator kinerja serta Tingkat pencapaian strategis.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan, sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Upau Tahun 2025.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaanya, Renja Kecamatan Upau Tahun 2025 akan dilakukan monitoring dan evaluasi, baik itu mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi maupun pagu indikatif.

Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras dan kerja bersama oleh sumber daya manusia Kecamatan Upau dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan Tabalong Terdepan.

Upau, Agustus 2025

CAMAT UPAU


AGUSTIAN, SE, Kp
NIP. 19830809 200501 1 004